

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya menunjukkan adanya perkembangan kegiatan dalam perekonomian dalam jangka panjang. Perkembangan tersebut ditunjukkan oleh peningkatan produksi barang dan jasa akibat daya beli masyarakat yang bertambah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi akan membawa dampak pada kesejahteraan masyarakat.

Studi yang dilakukan oleh Karlina (2017) mengungkapkan definisi dari pertumbuhan ekonomi, yaitu perkembangan kegiatan perekonomian yang membuat kegiatan produksi barang dan jasa semakin meningkat. Besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional ditunjukkan oleh indikator Produk Domestik Bruto (PDB). Indikator tersebut terdiri dari pendapatan total dan pengeluaran total, baik dalam tingkat nasional maupun regional atas *output* barang dan jasa dalam periode tertentu. Nilai PDB dapat mencerminkan keberhasilan kinerja ekonomi di negara terkait, yakni semakin tinggi PDB, maka dapat semakin bagus pula kinerja ekonomi di wilayah tersebut (Syahputra, 2017).

Formula untuk menghitung PDB yang paling populer adalah  $Y = C + I + G + (X - M)$ . Komponen Y menunjukkan pendapatan nasional, dalam hal ini merujuk

pada PDB. Adapun komponen yang lain, yaitu *C (consumption)* menunjukkan permintaan sektor rumah tangga untuk barang konsumsi berupa barang dan jasa. Komponen *I (investition)* menunjukkan barang-barang investasi yang diminta sektor bisnis. Komponen *G (government spending)* menunjukkan pengeluaran atau belanja pemerintah berupa barang dan jasa. Komponen *(X-M)* menunjukkan pengeluaran sektor luar negeri berupa ekspor dan impor (Anwar, 2016).

## **2.2 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi nasional tentu tidak terlepas dari kontribusi pertumbuhan ekonomi regional. Kontribusi ini didukung oleh adanya penetapan kebijakan pelaksanaan otonomi daerah yang memacu setiap daerah untuk mewujudkan kemandirian daerahnya masing-masing. Kemandirian daerah dapat dilihat pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data yang disajikan dalam PDRB menggambarkan kinerja daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi daerah, perkembangan ekonomi daerah, tingkat inflasi PDRB, kontribusi atau sumbangan sektoral PDRB, struktur perekonomian daerah, dan lain-lain.

Definisi PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit produksi di wilayah pada suatu negara pada jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun. Nilai tambah didapatkan dari perkalian antara volume dan harga barang jasa yang dihasilkan dari kegiatan semua unit ekonomi daerah. Sektor ekonomi tersebut terdiri atas 17 (tujuh belas) lapangan usaha.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa salah satu faktor perhitungan PDRB adalah harga barang dan jasa. Berdasarkan harga ini, terdapat 2 (dua) model penyajian PDRB, yaitu:

1. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

PDRB ADHB juga disebut sebagai PDRB nominal. Untuk menyajikan PDRB, model ini menggunakan harga yang berlaku di setiap tahun untuk menghitung nilai akhir barang dan jasa. PDRB ADHB biasanya digunakan untuk mengidentifikasi struktur ekonomi daerah.

2. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

PDRB ADHK sering disebut sebagai PDRB riil. Model ini menggunakan harga tahun tertentu sebagai tahun dasar untuk menghitung nilai akhir barang dan jasa yang kemudian dilaporkan dalam PDRB. Tahun yang dipilih sebagai tahun dasar adalah tahun yang mengalami kondisi perekonomian stabil, kondusif, dan inflasi yang terkendali. Menurut pencatatan statistik nasional, tahun dasar PDB dan PDRB provinsi dan kabupaten/kota adalah tahun 2010 (Prasetyani & Sumardi, 2020). PDRB ADHK biasa digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Bagian ini menjelaskan teori/ketentuan dan/atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang dibahas. Bagian ini menjadi landasan (kriteria) untuk melakukan tinjauan/evaluasi/analisis atas praktik yang berlaku di objek penulisan.

### 2.3 Klasifikasi Lapangan Usaha

Prasetyani dan Sumardi (2020) mengungkapkan bahwa unit ekonomi yang ada di suatu wilayah dikelompokkan dalam sektor dan subsektor ekonomi (lapangan usaha). Klasifikasi ini telah ditetapkan dalam ketetapan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diatur oleh Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang KBLI. Menurut peraturan tersebut, KBLI didefinisikan sebagai pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

Ketetapan KBLI mengalami beberapa kali perubahan akibat pergeseran lapangan usaha dan kemunculan beberapa lapangan usaha untuk kegiatan ekonomi yang baru. Struktur KBLI tahun 2020 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II-1. Struktur Klasifikasi Baku (KBLI) 2009

<b>Kategori</b>	<b>Judul Kategori</b>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B	Pertambangan dan Penggalian
C	Industri Pengolahan
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
E	<i>Treatment</i> Air, <i>Treatment</i> Air Limbah, <i>Treatment</i> dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi
F	Konstruksi
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
H	Pengangkutan dan Pergudangan
I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Dan Makan Minum
J	Informasi dan Komunikasi
K	Jasa Keuangan dan Asuransi
L	Real Estat
M	Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis

N	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P	Pendidikan
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial
R	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi
S	Aktivitas Jasa Lainnya
T	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri
U	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

Sumber: Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020

Namun, penyajian sektor ekonomi pada PDB dan/atau PDRB dipadatkan menjadi 17 (tujuh belas) sektor yang masing-masing nama sektor masih mengacu pada ketentuan lama. Data sektor ekonomi yang ditampilkan pada PDB dan PDRB adalah:

Tabel II-2. Pembagian Sektor Ekonomi pada Penyajian Data PDB dan PDRB

<b>Kategori</b>	<b>Lapangan Usaha</b>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B	Pertambangan dan Penggalian
C	Industri Pengolahan
D	Pengadaan Listrik dan Gas
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
F	Konstruksi
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H	Transportasi dan Pergudangan
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
J	Informasi dan Komunikasi
K	Jasa Keuangan dan Asuransi
L	Real Estat
M,N	Jasa Perusahaan
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
P	Jasa Pendidikan
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R,S,T,U	Jasa Lainnya

Sumber: Laporan PDRB Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi Menurut Lapangan Usaha 2017-2021

## 2.4 Sektor Basis Ekonomi

Sektor basis juga dapat disebut sebagai sektor unggulan (ekonomi). Hal ini disebabkan sektor basis merupakan suatu sektor yang mampu untuk mencukupi kebutuhan internal daerah itu sendiri, baik berupa barang maupun jasa, hingga dapat melakukan ekspor ke luar daerah tersebut sebagai daerah penghasilnya. Sebaliknya, yang disebut sebagai sektor nonbasis ialah sektor yang hanya mampu mencukupi kebutuhan masyarakat daerahnya sendiri. Namun, sektor basis dapat memberikan *multiplier effect* bagi sektor nonbasis untuk berkembang dalam perekonomian daerah sehingga dapat menjadi sektor basis (Pribadi & Nurbiyanto, 2021).

Penentuan sektor basis dan non basis ini dirujuk berdasarkan Teori Basis Ekonomi. Teori ini memberikan pandangan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah terkait. Metode yang banyak digunakan untuk menggolongkan sektor basis dan nonbasis adalah *Location Quotient*. Metode ini membandingkan antara nilai sektor ekonomi tertentu di wilayah yang kemudian dibandingkan dengan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas daripada daerah yang diteliti.

## 2.5 Pergeseran Struktur Ekonomi

Studi yang dilakukan oleh Pratiwi (2021) mengungkapkan bahwa pergeseran struktur ekonomi pertama kali diperkenalkan oleh Fisher di tahun 1935 yang didukung oleh Teori *Two-Sector Model* oleh Lewis. Teori tersebut menjelaskan bahwa pada negara berkembang terjadi transformasi struktur perekonomian dari pertanian ke sektor industri manufaktur dan sektor jasa. Adapun penyebab perubahan ini ialah perubahan konsumsi masyarakat. Semakin

tinggi pendapatan masyarakat akan membuat proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli bahan pertanian dan beralih kepada sektor yang lainnya. Mardiana et al. (2017) berpendapat bahwa transformasi struktural atau pergeseran struktur ekonomi adalah sebuah proses perubahan pada sektor-sektor ekonomi yang terkait satu sama lain yang terjadi di suatu wilayah. Apabila suatu sektor ekonomi mengalami perubahan, baik berupa peningkatan atau penurunan, maka perubahan tersebut akan mengubah kondisi sektor ekonomi lainnya. Transformasi struktural disebabkan oleh adanya pertumbuhan ekonomi berupa peningkatan dan pembangunan kinerja perekonomian pada suatu wilayah oleh pemerintah daerah setempat dan bersifat berkelanjutan